



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HERU SETIAWAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS JENDERAL**
3. NHK : **56920**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **6.310.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 300 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m<sup>2</sup>/75 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m<sup>2</sup>/54 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 1282 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.410.200.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **608.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, ISUZU PANTHER MPV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



4. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
120.000.000

5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI  
Rp. 400.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 63.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 74.181.079

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 7.055.381.079

**III. HUTANG** Rp. 1.741.967.907

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.313.413.172

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.